



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Ada Upaya Penyelundupan Anggaran

## Kecurigaan Fraksi PDIP

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan mencurigai adanya upaya penyelundupan anggaran. Alhasil, partai banteng moncong putih tersebut menyorotinya mulai dari proyek adan usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro) hingga Tim Gubernur Percepatan Pembangunan atau TGUPP. Hal tersebut dilayangkan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, fraksinya menyoroti keputusan Pemprov DKI Jakarta yang melimpahkan banyak proyek kepada badan usaha PT Jakpro.

Proyek-proyek itu, sambung Jhonny, antara lain membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment Rp0, Jakarta International Stadium, moda light rail transit (LRT), menyelenggarakan balapan Formula E dan merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Pemprov DKI juga, lanjut dia, mengusulkan penyer-taan modal daerah (PMD) yang akan diberikan kepada Jakpro untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020. "Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD," ungkap dia kepada INDOPOS ■

Jhonny menuturkan, proyek-proyek yang dikerjakan Jakpro merupakan janji politik Gubernur, Anies Baswedan. Proyek-proyek tersebut seharusnya dikerjakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Misalnya, pembangunan rusunami DP Rp0 harusnya dikerjakan Dinas Perumahan, sementara revitalisasi TIM seharusnya dieksekusi Dinas Pariwisata.

"Penunjukan BUMD sebagai pelaksana program-program tersebut bisa menyebabkan fungsi SKPD menjadi tumpul karena seolah tidak diberi amanah oleh Gubernur untuk menyelesaikan program-program tersebut," beber dia.

Dia menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan fungsi PMD yang akan diberikan kepada Jakpro. Sebab, PMD tersebut tidak memberikan dividen yang signifikan kepada Pemprov DKI. "Besarnya PMD yang dikucurkan tiap tahun kepada BUMD tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BUMD, termasuk besaran

dividennya," ucap Jhonny.

Jhonny menambahkan, fraksinya juga mengkritisi keberadaan TGUPP dalam struktur Pemerintah DKI, bahkan mendesak agar anggaran untuk tim tersebut dicoret. "Kami meminta agar untuk TGUPP dihapuskan," tandas dia.

Jhonny menilai, kehadiran TGUPP sebagai perpanjangan tangan Anies selama ini kerap mempengaruhi kebijakan SKPD. Hal ini memperburuk program-program yang telah dicanangkan oleh SKPD.

Diamini Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Dia menilai, tim itu sudah keluar dari koridor dan menghambat kerja gubernur dan perangkat daerah. Menurut dia, tim yang awalnya dibentuk di era Gubernur Jokowi tersebut bertujuan untuk menampung pegawai dengan golongan tinggi yang non-job.

Kelompok kerja itu kemudian diperkuat dengan mendatangkan sejumlah profesional dari luar pemerintah DKI. "Tapi, di era Anies, jumlah anggota dan anggarannya terlalu fantastis," tuntas dia. (aen)

